

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pos Keadilan Peduli Umat- *Human Initiative* (PKPU-HI) adalah organisasi non pemerintahan yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Organisasi ini didirikan pertama kali pada tanggal 10 Desember 1999 didasari karena adanya rasa kepedulian dari sekelompok pemuda terhadap tragedi kemanusiaan dan krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1999. (PKPU, 2013)

Pada tahun 1997, negara-negara ASEAN mengalami krisis ekonomi regional yang menyebabkan keterpurukan. Krisis tersebut terjadi karena adanya depresiasi mata uang terhadap dolar Amerika. Diantara negara-negara yang mengalami keterpurukan tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami krisis terparah. Hal ini tidak hanya berputar dalam bidang ekonomi, namun juga sudah menyebar ke aspek-aspek lainnya, seperti di bidang politik, pendidikan, budaya, moral, teknologi, bahkan religi. (Mahmudya, 2017)

Melihat kondisi yang terjadi, sejumlah pemuda yaitu Raden Bagus Suryama Majana Sastra, Sahabudin, Agung Notowiguno, dan Dedi Sularso menyikapi hal tersebut dengan menyumbangkan kontribusi mereka melalui aksi-aksi dan kegiatan sosial seperti aksi yang dilakukan pada tanggal 17 September 1998 di berbagai daerah di Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, mereka juga menggagas sebuah kesatuan yang bergerak dalam kepedulian publik secara teratur dan terstruktur. (Mahmudya, 2017)

Pada 8 Oktober 2001, PKPU ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 44. PKPU terdaftar di PBB sebagai NGO dengan “*Special Consultative Status with the Economic*

Social Council” Pada 22 Juli 2008. Lalu pada 29 Januari 2010, PKPU resmi terdaftar sebagai Organisasi Sosial Nasional berdasarkan Keputusan Menteri RI No. 08/Huk/2010, serta pada 8 Oktober 2010 terdaftar di UNI Eropa Organisasi ini pun terdaftar di UNI Eropa pada tanggal 8 Oktober 2010 yang memiliki nomor registrasi EuropeAid ID No. 2010-CSD-1203198618. Dengan diberlakukannya UUD Zakat Nomor 11 Tahun 2011, PKPU-HI yang awalnya bernama Pos Keadilan Peduli Umat dan mengelola dana zakat pun harus melakukan *spin off* pada awal tahun 2016, dimana PKPU pun memfokuskan organisasi dalam mengelola dana kemanusiaan, pada akhir tahun 2016 NGO ini juga mengubah nama menjadi PKPU Human Initiative (PKPU, 2017)

Dalam perjalanan organisasi kemanusiaan ini, PKPU-HI banyak memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang mengalami konflik atau bencana, seperti gempa bumi di Aceh dan Yogyakarta. Tidak hanya dalam negeri, PKPU HI juga banyak menyalurkan bantuan ke luar negeri. PKPU-HI banyak berkontribusi dalam penyaluran bantuan ke negara-negara lain. Seperti pemberian bantuan ke negara-negara yang membutuhkan seperti Somalia dan Kenya. PKPU-HI mengirimkan paket makanan dan distribusi air minum bagi pusat-pusat penampungan pengungsi, wilayah pedesaan terpencil, serta bantuan air yang dialurkan untuk penduduk, pengungsi dan peternakan di Somalia. (Murdaningsih, Republika, 2017) Selain itu, banyak bantuan yang disalurkan PKPU-HI ke daerah-daerah yang sedang mengalami konflik dan menimbulkan banyak korban, seperti bantuan kemanusiaan yang dikirimkan ke Rohingya dalam hal-hal kebutuhan pokok, yakni bahan pangan, tempat tinggal, dan fasilitas sanitasi di kamp-kamp pengungsian. (Bomasir, 2017) Seperti pengiriman ke Rohingya, PKPUHI menyalurkan bantuan ke daerah konflik Gaza berupa makanan untuk para pengungsi terutama bagi balita, ibu hamil dan lansia, selain itu PKPU juga memberikan fasilitas alat- alat kebersihan. Untuk memudahkan pertolongan warga akibat agresi Isrel, PKPU

turut memberikan bantuan berupa panel surya untuk rumah sakit disana. (Hidayat, 2014) Tidak hanya ke negara tersebut, NGO ini juga banyak berkontribusi dalam mengirimkan bantuan-bantuan ke negara-negara lain, salah satunya adalah penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik Suriah.

Suriah (*Syria*) memiliki nama resmi Republik Arab Suriah, merupakan sebuah negara yang berada di wilayah Asia barat. Negara ini berbatasan dengan Lebanon dan Laut Mediterania di sebelah barat, berbatasan dengan Negara Turki di sebelah utara dan di sebelah timur berbatasan dengan Yordania Selatan dan Israel. (Manshur, 2014)

Gambar 1.1. Daerah konflik Suriah



Sumber: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22798391>

Negara ini mengalami konflik yang pertama kali diawali dengan adanya demonstrasi dari rakyat Suriah yang menuntut agar Presiden Bashar Al- Assad mengundurkan diri dari jabatan kepemimpinannya. Mereka juga menginginkan kepemimpinan Partai Ba'ath yang telah berkuasa selama lima

dekade tersebut segera berakhir. Konflik Suriah tidak terlepas dari adanya pengaruh revolusi lainnya yang terjadi di kawasan Timur Tengah dalam gelombang *Arab Spring*. Pihak oposisi tersebut bersatu dibawah bendera Tentara Pembebasan Suriah dan melakukan gerakan yang semakin terorganisir dengan tujuan untuk membentuk negara yang lebih demokratis. Demonstrasi publik ini terjadi pertama kali pada tanggal 26 Januari 2011 dan semakin berkembang hingga menjadi pemberontakan nasional. (Kinsal, 2014)

Konflik Suriah terus membesar hingga menimbulkan banyak kerugian. Warga Suriah pun menghadapi situasi yang sulit, seperti kesulitan mendapatkan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Banyak korban yang berjatuh akibat konflik ini, seperti yang dinyatakan oleh Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia di Suriah (SOHR), bahwa dalam 7 tahun, sudah lebih dari 360.000 orang yang meninggal akibat konflik ini. (Yasinta, 2018)

Cukup banyak LSM Internasional yang berusaha masuk ke daerah konflik Suriah untuk memberikan bantuan kemanusiaan, namun tidak semua bantuan yang dikirimkan dapat berhasil masuk ke daerah konflik Suriah. Seperti yang dikatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bahwa 49,5 ton pasokan medis yang dsalurkan telah sepenuhnya ditolak oleh pemerintah Suriah. (Beals & Hopkins, 2016) Tidak hanya bantuan medis, tapi juga pasokan bahan pangan dikurangi dalam jumlah besar. Dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Suriah, PKPU-HI menjadi salah satu LSM dari Indonesia yang berhasil menyalurkan bantuan ke daerah konflik tersebut.

Proses penyaluran bantuan kemanusiaan ke daerah konflik Suriah tidaklah mudah, ada beberapa hambatan yang menyulitkan banyak pihak dalam memberikan bantuan, seperti sulitnya izin yang diberikan oleh Suriah kepada organisasi yang ingin mengantarkan bahan pertolongan (VOA Indonesia, 2016). Selain itu, banyak lembaga bantuan kemanusiaan yang

menyatakan bahwa pemerintah Suriah tidak memberikan izin masuk atau visa karena adanya pembatasan jumlah kelompok bantuan asing yang diizinkan beroperasi di Suriah. (Berita Satu, 2013) Penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Suriah juga kerap terganggu oleh rangkaian bombardir udara dan artileri yang terus terjadi, seperti adanya serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan pada 19 September 2016. (BBC, 2016) Penyaluran bantuan juga semakin dipersulit dengan tidak adanya akses ke daerah-daerah yang terkepung di Suriah. (ICRC, 2014)

Sejumlah NGO berhasil masuk ke Suriah dan sukses menyalurkan bantuan yang mereka kirimkan kepada warga-warga Suriah yang membutuhkan. NGO Internasional tersebut antara lain adalah *International Committee of the Red Cross* (ICRC) yang memiliki program dengan fokus yang lebih besar kepada anak-anak dan perempuan, *İnsani Yardım Vakfı* atau Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki (IHH), merupakan salah satu NGO terbesar yang berasal dari Turki, selain IHH juga ada *Yesevi Aid Movement*, NGO besar lainnya yang juga lahir di Turki dan banyak memberikan bantuan bagi sektor pendidikan di Suriah, lalu ada pula NGO besar Islamic Relief, dan NGO lainnya. Namun tidak hanya NGO Internasional besar saja yang sukses dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan.

PKPU-HI merupakan salah satu NGO yang mampu menyalurkan bantuan ke Suriah. NGO ini berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan ke daerah konflik sejak Februari 2013. Saat itu, bantuan yang diberikan adalah berupa makanan, pakaian dan perlengkapan dalam menghadapi musim dingin. Selanjutnya PKPU-HI terus menyalurkan bantuan kepada korban konflik Suriah yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka serta melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk membantu warga sipil korban perang. (Achyar, 2013)

Gambar 1.2 PKPU HI Menyalurkan Bantuan ke Suriah



Sumber: <https://www.dakwatuna.com/2017/07/27/88015/pkpu-kembali-salurkan-bantuan-untuk-suriah/#axzz5fasVMv1E>

Meskipun ada banyak hambatan, penyaluran bantuan kemanusiaan kepada Suriah masih dilakukan oleh PKPU-HI hingga saat kajian ini tulis pada bulan Februari 2019. Berhasil atau tidaknya proses penyaluran bantuan kemanusiaan ini tidak terlepas dari strategi yang dimiliki oleh PKPU-HI.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi PKPU- HI dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Suriah pada tahun 2013- 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang diambil penulis adalah:

Bagaimana strategi PKPU HI dalam menyalurkan bantuan ke Suriah tahun 2013-2018?

D. Kerangka Teori

1. Transnasionalisme

James Rosenau mendefinisikan transnasionalisme sebagai “Proses dimana hubungan internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah telah disertai oleh hubungan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat swasta yang dapat memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi berlangsungnya berbagai peristiwa.” (Jackson & Sorensen, 2005)

Transnasionalisme mengacu pada difusi dan perluasan proses sosial, politik, ekonomi di antara dan di luar batas-batas yurisdiksi berdaulat negara-bangsa. Proses internasional semakin diatur oleh aktor non-negara dan organisasi internasional. Robinson (1998) menyatakan bahwa, seperti “struktur sosial menjadi transnasionalisasi; perubahan epistemik diperlukan sesuai dengan perubahan ontologis ini.” Topik utama yang dibahas oleh studi transnasional meliputi: globalisasi ekonomi, transnasionalisasi negara, kelas, proses politik, dan budaya, dan proses integrasi saat ini terjadi di seluruh dunia melalui organisasi formal seperti NAFTA dan Uni Eropa (Robinson 1998). (Global Social Theory)

Transnasionalisme memiliki ide bahwa peran aktor negara yang dibatasi oleh wilayah dan kekuasaan berkurang. Dalam transnasionalisme ini, hubungan antar negara dengan negara yang lain menjadi lebih cair dan bersifat lintas batas. Sistem yang telah bergeser menjadi lebih transnasional tersebut kemudian memunculkan aktor non negara dengan pengaruh yang cukup signifikan diberbagai ranah. Salah satu aktor non negara yang cukup signifikan dalam transnasionalisme adalah *Non Government Organization*. Aktor non negara,

seperti NGO, dan gerakan transnasional adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Gerakan transnasional menjadi salah satu metode bagi NGO dalam upayanya mengusung sebuah isu ataupun menjalankan programnya. Gerakan yang bersifat lintas batas negara tersebut memungkinkan ranah gerak yang lebih luas bagi aktor non negara, karena usaha yang dilakukan tidak dibatasi oleh teritori tertentu. (Parameswari, 2016)

Pos Keadilan Peduli Umat-*Human Initiative* merupakan salah satu NGO yang bergerak lintas batas negara. PKPU-HI menjadi organisasi yang banyak berkontribusi dalam memberikan bantuan bagi negara-negara lain yang sedang mengalami krisis atau konflik dimana kondisi tersebut membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain.

PKPU-HI menjadi salah satu aktor dalam membantu isu kemanusiaan di Suriah. PKPU-HI merupakan NGO yang lahir dan berasal dari Indonesia, namun tetap memiliki peran dan mampu melakukan penyaluran bantuan ke negara lain, yang salah satunya adalah daerah konflik Suriah. PKPU-HI bergerak melewati batas teritori dan aktif memberikan kontribusi dalam hubungan internasional khususnya yang berkaitan dengan isu sosial kemanusiaan.

2. *Transnational Advocacy Network*

Dalam menganalisis kajian ini, penulis menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network*. *Transnational Advocacy Network* menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink merupakan jaringan aktor-aktor internasional yang bekerja dalam sebuah isu, dengan adanya keterikatan kepada shared values dan common discourse, serta memiliki intensitas yang padat

dalam pertukaran informasi serta jasa. (Keck & Sikkink, 1999)

Aktor-aktor utama dalam jaringan advokasi dapat meliputi LSM internasional dan domestik, organisasi penelitian dan advokasi; Gerakan sosial lokal; Yayasan; media; gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen, intelektual; bagian dari organisasi antar pemerintah regional dan internasional; bagian dari eksekutif dan / atau cabang pemerintahan parlementer. (Keck & Sikkink, 1999)

Transnational advocacy network akan muncul dengan adanya kondisi:

- a. Struktur penghubung antara kelompok lokal dan pemerintah terhambat atau terputus, dimana beberapa struktur penghubung tersebut tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga memunculkan situasi “*boomerang pattern*” yang mempengaruhi karakteristik dari jaringan tersebut.
- b. Aktivis atau *political entrepreneur* percaya bahwa jaringan tersebut akan memajukan misi–misi dan kampanye–kampanye mereka, serta secara aktif mempromosikan mereka
- c. Konferensi internasional dan berbagai bentuk interaksi internasional lainnya memberikan wadah untuk membentuk dan menguatkan jaringan.

Dalam pelaksanaannya, *transnational advocacy network* memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk melakukan advokasi, yaitu (Keck & Sikkink, 1999) :

- a. *Information politic*, atau kemampuan untuk menggerakkan informasi yang dapat

- digunakan secara politis dengan cepat dan kredibel, sehingga dapat digunakan untuk mempengaruhi sebuah kebijakan.
- b. *Symbolic politic*, atau kemampuan untuk menggunakan simbol, aksi atau cerita tertentu yang dari suatu situasi atau klaim yang dapat untuk menarik perhatian dari pihak-pihak lain.
 - c. *Leverage politic*, atau kemampuan untuk berhubungan dengan aktor-aktor lain yang dapat pengaruh yang kuat dalam suatu situasi yang terjadi
 - d. *Accountability politic*, atau upaya untuk melakukan pengawasan atau menjaga aktor yang lebih kuat untuk bertindak berdasarkan kebijakan atau prinsip yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan mereka.

PKPU-HI menjadi salah satu aktor yang memperjuangkan isu bersama yaitu isu sosial kemanusiaan dalam konflik Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah menyebabkan banyak sekali kerugian dan terabaikannya hak-hak warga di negara tersebut. Banyak korban yang berjatuh, warga Suriah pun sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Peran dari pemerintah Suriah tidak juga mampu menyelesaikan permasalahan warga disana, banyak korban yang menghadapi situasi sulit dan tidak menemukan solusi dari susahnyanya mendapatkan kebutuhan mereka. NGO-NGO lokal di Suriah yang banyak beroperasi juga belum bisa menjangkau semua warga yang membutuhkan, dalam hal ini, PKPU-HI pun turut mengambil peran dalam isu ini dengan melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Suriah.

Penyaluran bantuan juga menghadapi banyak hambatan dan kesulitan, oleh karena itu PKPU-HI juga memiliki beberapa strategi yang dilakukan dalam menjalankan misi mereka di Suriah.

E. Hipotesis

Pos Keadilan Peduli Umat- *Human Initiative* adalah sebuah NGO yang bergerak dan fokus dalam isu sosial kemanusiaan. Dapat diambil kesimpulan sementara dalam melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan ke daerah konflik Suriah, PKPU- HI melakukan beberapa strategi yang merupakan cerminan dari Keck dan Sikkink, yakni

1. Melakukan research tentang bantuan kemanusiaan terkait penyaluran bantuan ke daerah konflik Suriah (*Information politics*).
2. Mengadakan sebuah kampanye yang menyuarakan pembelaan korban konflik Suriah dan ajakan untuk memberikan bantuan ke Suriah (*Symbolic politics*).
3. Melakukan kerjasama dengan aktor non pemerintahan untuk memudahkan penyaluran bantuan ke Suriah (*Leverage politics*)

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan ilmiah ini adalah studi pustaka. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder dimana penulis akan menggunakan studi kepustakaan diantaranya data-data yang bersumber dari buku atau e-book, artikel, jurnal, berita dan juga sumber dari interne

G. Batasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan masalah mengenai “Bagaimana strategi PKPU-HI dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Suriah?”, maka pembahasan mengenai permasalahan tersebut dibatasi dalam jangka waktu dari 2013-2018.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan mengenai skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yang terdiri dari

Bab I adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, hipotesa sebagai dugaan awal, metode penulisan skripsi, batasan masalah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang penjelasan NGO secara umum. Bab ini akan membahas bagaimana peran dan pengaruh dari INGO dalam hubungan internasional. Selain itu bab ini juga akan menjelaskan tentang NGO PKPU-HI, peran dan fungsinya, dan menjelaskan perannya dalam dunia internasional, khususnya isu- isu sosial kemanusiaan.

Bab III akan menjelaskan tentang konflik Suriah yang diawali dengan adanya demonstrasi dari warga Suriah yang menuntut turunnya Presiden Bashar Al-Assad. Akan dijelaskan juga tentang peran INGO di dalamnya.

Bab IV akan menjelaskan tentang strategi- strategi yang dilakukan oleh NGO Pos Keadilan Peduli Umat-

Human Initiative dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Suriah.

Bab V akan berisi tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.